



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Terekam, Warga Seenaknya Buang Sampah di Belakang Kecamatan Krian

Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Aksi warga membuang sampah seenaknya di belakang Kantor Kecamatan Krian, Sidoarjo terekam kamera CCTV. Pelaku pembuang sampah yang nekat itu saat ini tengah ditelusuri untuk diproses sesuai aturan yang berlaku.

Camat Krian Kusdianto mengatakan pihaknya sedang mencari identitas pelaku melalui rekaman CCTV. Sampah yang dibuang di lokasi itu cukup beragam, mulai dari kemasan makanan dan minuman, sampai sisa buah.

"Sampahnya cukup beragam, mulai dari kemasan makanan dan minuman hingga sisa buah. Mulai dari kulit semangka hingga kelapa," kata Kusdianto, Selasa (22/9/2026).

Kusdianto menduga sampah-sampah tersebut dibuang oleh pedagang kaki lima. Namun, pihaknya masih berupaya memastikan identitas pelaku berdasarkan rekaman kamera pengawas. "Kalau dilihat-lihat mereka ini dari pedagang kaki lima," imbuhnya.

Menurut Kusdianto, pemasangan CCTV dilakukan untuk memantau lokasi yang selama ini kerap menjadi tempat pembuangan sampah liar. Rekaman kamera itu nanti bisa digunakan sebagai petunjuk untuk mengetahui warga yang membuang sampah sembarangan.

Jika pelaku berhasil diidentifikasi, Kusdianto mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) serta Satpol PP untuk menindak sesuai ketentuan. "Kami berupaya mencari tahu siapa yang membuang sampah tersebut melalui rekaman CCTV. Kalau pelaku berhasil diketahui, kami ingin yang bersangkutan mendapat sanksi tegas sesuai aturan," jelasnya.

Penindakan akan mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Pelaku bisa diproses sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk melalui tindak pidana ringan (tipiring) apabila memenuhi unsur pelanggaran.

Kusdianto berharap adanya CCTV dan penindakan dapat membuat warga tidak lagi membuang sampah sembarangan di kawasan tersebut. Ia menegaskan area belakang Kantor Kecamatan Krian bukan tempat pembuangan sampah.

"Harus ada efek jera, jangan sampai masih ada yang membuang sampah sembarangan," pungkas Kusdianto. (md/rus)



Warga yang buang sampah seenaknya di tepi jalan belakang Kantor Kecamatan Krian, Sidoarjo.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Buntu, Audiensi Kasus Tanah Kas Desa jadi Kos di Sidoarjo

Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Audiensi warga Desa Damarsi, Kecamatan Buduran, dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo terkait penanganan kasus yang mereka laporkan belum membuahkan hasil. Warga pun menyiapkan aksi demonstrasi ke kantor Kejari Sidoarjo pada Rabu (23/9/2026).

Dalam audiensi tersebut, warga ditemui Kasi Pidsus Kejari Sidoarjo Sigit Sambodo dan Kasi Intelijen. Warga mendapat penjelasan bahwa perkara tersebut masih berada pada tahap penyelidikan dan belum ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Perwakilan warga Damarsi, Al-Suari mengatakan, pihaknya menghargai penjelasan dari kejaksaan. Namun, warga merasa belum ada kemajuan yang signifikan karena perkara yang



Warga Damarsi usai audiensi dengan Kejari Sidoarjo.

mereka harapkan sudah masuk penyidikan ternyata masih berada pada tahap penyelidikan. "Harapan kami sebenarnya sudah masuk penyidikan. Tapi setelah audiensi, ternyata masih penyelidikan. Jadi kami merasa belum ada hasil yang nyata," kata

Al-Suari, Selasa (22/9/2026).

Menurut Al-Suari, kejaksaan masih membutuhkan satu kali pemanggilan terhadap Agus Sasongko untuk dimintai keterangan. Jika yang bersangkutan kembali tidak hadir, kejaksaan akan mengambil langkah hukum

selanjutnya. "Disampaikan masih ada satu kali pemanggilan Agus Sasongko. Kalau tidak hadir, akan dilakukan gelar perkara internal. Setelah itu rencananya diekspos ke Kejati Jatim," ujarnya.

Al-Suari menyebut, warga akan bermusyawarah untuk menentukan apakah aksi demonstrasi pada 23 September tetap digelar atau ditunda beberapa hari. Namun, kesiapan warga untuk melakukan aksi disebut sudah matang. "Warga sudah siap lebih dari 100 orang. Iuran dan perlengkapan juga sudah disiapkan. Kami tetap berkomitmen memperjuangkan tuntutan ini sampai ada hasil," tegasnya.

Dia menambahkan, kesepakatan dengan pihak kejaksaan baru sebatas permintaan agar warga memberikan waktu untuk proses pemanggilan tersebut. Menurut-

ya, belum ada kesepakatan pasti bahwa aksi pada 23 September akan dibatalkan.

Kasi Pidsus Kejari Sidoarjo Sigit Sambodo menjelaskan, perkara ini masih dalam tahap penyelidikan. Kejaksaan telah meminta keterangan dari sekitar 13 orang untuk mengumpulkan dan melengkapi data. "Masih penyelidikan. Kami sudah meminta keterangan sekitar 13 orang, baik dari unsur Desa Damarsi maupun pihak swasta atau pembeli," kata Sigit.

Sigit menyebut, masih ada satu keterangan yang dinilai penting untuk melengkapi data penanganan perkara, yakni keterangan Agus Sasongko. "Masih menunggu satu keterangan dari Agus Sasongko. Keterangan tersebut penting untuk melengkapi data yang sedang kami kumpulkan," jelasnya. (md/rus)

HARIAN
BANGSA
Koran Warga Jatim



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Desain Flyover Gedangan Belum Final

Terkendala Double Track Kereta Api

SIDOARJO – Meski pembebasan lahan sudah berjalan, Desain Flyover (FO) Gedangan masih belum final. Rencana membangun flyover dengan enam lajur terhambat pengembangan jalur kereta api double track. Belum ada kesepakatan antara pemkab, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), dan PT KAI terkait desain akhir. Kepala Dinas Pekerjaan

Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo Muhammad Makhmud mengatakan, persoalan muncul karena kebutuhan ruang untuk FO bersinggungan dengan lahan yang juga diperlukan untuk pengembangan jalur kereta api. “Ini kami masih mencari solusi dari tiga instansi yang menjadi titik simpulnya, tapi belum final,” kata Makhmud kemarin (22/9).

Dua Opsi Desain

Saat ini, terdapat dua opsi desain yakni empat atau enam lajur. Pemkab sendiri

cenderung memilih desain enam lajur. Makhmud menilai kapasitas tersebut lebih mampu mengakomodasi kebutuhan lalu lintas dalam jangka panjang.

Menurutnya, desain enam lajur diproyeksikan mampu melayani kebutuhan hingga sekitar 30 tahun. Pemkab memilih menyiapkan kebutuhan lahan sejak awal daripada harus melakukan pembebasan lahan kembali ketika kapasitas jalan sudah tidak mencukupi.

“Kalau enam lajur, kami hitung sampai 30 tahun. Daripada nanti harus mem-



KOORDINASI:
Kepala DPUBMSDA Sidoarjo Muhammad Makhmud (kiri) bersama Asisten Administrasi Perencanaan dan Pembangunan Sekda Kabupaten Sidoarjo Bachrul Amia memimpin rapat pembahasan Flyover Gedangan kemarin (22/9).

DUA OPSI DESAIN FLYOVER GEDANGAN

4 Lajur	• Pengerjaan lebih simpel • Proyek lebih cepat selesai	• Usia lebih pendek • Lebih sempit
6 Lajur	• Lebih lebar • Kapasitas kendaraan lebih besar	• Pembangunan lama • Terkendala double track • Usia lebih tua

SUMBER: BAKU PEMKAB SIDOARJO, BBPJN, KAI

bebaskan lahan lagi, lebih baik disiapkan sekarang,” ujarnya. Namun, pilihan enam lajur belum dapat dipastikan. Kebutuhan ruang yang lebih besar harus diselesaikan dengan rencana pembangunan double track kereta api. Kesepakatan mengenai batas dan kebutuhan lahan antara pemkab dan PT KAI menjadi kunci penetapan desain.

Menunggu

Kesepakatan Lahan
Core Team P2JN BBPJN Jatim-Bali Indi Sasongko mengatakan, pilihan empat

maupun enam lajur masih terbuka. Dari sisi teknis lalu lintas, enam lajur dinilai lebih mampu melayani pergerakan kendaraan. Dalam konsep enam lajur, masing-masing sisi memiliki tiga lajur pada bagian bawah frontage.

Sebaliknya, desain empat lajur membutuhkan lahan lebih sedikit. Namun, konsekuensinya kapasitas kendaraan yang dapat dilayani juga lebih terbatas. “Kalau sudah ketemu kesepakatannya, kami dari BBPJN bisa mengoptimalkan desainnya. Sekarang masih menunggu kesepakatan lahan,” kata Indi. (ful/hen)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pencairan Bantuan Keuangan 318 Desa Menunggu Perbup

SIDOARJO –Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk 318 desa senilai Rp 200 juta per desa masih belum cair. Pemberian bantuan menunggu peraturan bupati (Perbup) yang menjadi dasar kebijakan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sidoarjo Chusnul Inayah mengatakan, pihaknya belum dapat memproses pencairan sebelum Perbup dan petunjuk teknis (juknis) seluruhnya rampung. "Kendalanya Perbup belum keluar. Kami masih menunggu Perbup dan juknisnya,"

katanya kemarin (22/9).

Pemkab Sidoarjo menargetkan pencairan BKK untuk seluruh desa dapat dilakukan pada akhir September. Karena itu, penyelesaian regulasi terus dikebut agar pemerintah desa segera dapat mengajukan pencairan.

BKK untuk Empat Kebutuhan

Plh Sekda Sidoarjo Muhammad Ainur Rahman mengatakan, BKK tersebut disiapkan untuk empat kebutuhan. Yakni kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta Tempat Pengolahan



●● **Kendalanya Perbup belum keluar. Kami masih menunggu Perbup dan juknisnya.**

Chusnul Inayah
Kepala BPKAD Sidoarjo

Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R). Dari empat bidang tersebut, tiga juknis telah rampung. Desa sudah dapat mengajukan kebutuhan untuk bidang yang regulasinya telah tersedia.

"Untuk pendidikan, kesehatan sudah bisa diajukan," ujarnya. Sementara

itu, juknis untuk bidang infrastruktur masih dalam proses di Biro Hukum Pemprov Jatim. Pemkab berharap pembahasan tersebut segera selesai sehingga tidak menghambat proses pencairan. "Kami ingin prosesnya bisa selesai pekan ini," kata Ainur. (ful/hen)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DPRD KABUPATEN SIDOARJO

DPRD Kabupaten Sidoarjo Kawal Perubahan APBD 2026

**Pendapatan Turun
Rp 114,85 Miliar, Banggar
Dorong Genjot PAD**

DPRD Kabupaten Sidoarjo menyetujui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 bersama Pemkab Sidoarjo. Kesepakatan itu diambil setelah Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membahas pendapatan dan belanja daerah dalam rapat paripurna.



Hasil kesepakatan menetapkan pendapatan daerah sebesar Rp 4.925.463.674.972. Belanja daerah disepakati sebesar Rp 5.581.832.173.254. Sedangkan pembiayaan daerah sebesar Rp 656.368.498.282. Angka tersebut menjadi struktur Perubahan APBD 2026 yang disepakati DPRD bersama Pemkab Sidoarjo.

Juru Bicara Banggar DPRD Kabupaten Sidoarjo Muhammad Rojik mengatakan, pendapatan daerah dalam APBD 2026 sebelumnya ditetapkan sebesar Rp 5.040.318.361.985. Setelah perubahan, angkanya menjadi Rp 4.925.463.674.972 atau turun Rp 114.854.687.013. "Ini menjadi salah satu poin yang kami cermati," katanya.

Belanja daerah juga mengalami penyesuaian. Angkanya semula sebesar Rp 5.716.031.361.985, kemudian menjadi Rp 5.581.832.173.254 atau turun Rp 134.199.188.731. Sementara pembiayaan daerah yang semula Rp 675.713.000.000 dalam laporan banggar menjadi Rp 656.368.498.282.

Dalam pembahasan bersama TAPD, banggar juga membahas perubahan angka pendapatan dari rancangan sebelumnya. Pendapatan yang semula dirancang Rp 4.956.875.635.741 disepakati turun Rp 31.411.960.769 menjadi Rp 4.925.463.674.972. Penurunan pendapatan tersebut kemudian diikuti penyesuaian belanja dengan nilai yang sama.

Salah satu perhatian banggar adalah pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dewan merekomendasikan Pemkab agar meningkatkan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang



ANGGER BONDAN/JAWA POS

HASIL KESEPAKATAN: DPRD Kabupaten Sidoarjo menyetujui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 bersama Pemkab Sidoarjo.

terukur. Sumber-sumber pendapatan yang belum mencapai target juga diminta segera dievaluasi.

"Kami meminta, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyusun langkah percepatan terhadap sumber pendapatan yang belum mencapai target," ujarnya.

Baginya evaluasi dilakukan untuk melihat potensi pendapatan yang masih bisa dioptimalkan. Kendati demikian, dewan juga meminta agar pengelolaan pendapatan tetap memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat. "Jangan sampai membebani ekonomi masyarakat yang sedang sulit," terangnya.

Selain pendapatan, banggar juga menyoroti alokasi belanja daerah. Perubahan anggaran diminta disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, prioritas pembangunan, serta kemampuan perangkat daerah dalam menjalankan program. Dengan begitu, anggaran yang sudah dialokasikan tidak berhenti di atas kertas dan bisa benar-benar dilaksanakan.

"Setiap perubahan alokasi harus berdasarkan kebutuhan riil dan prioritas pembangunan, tujuannya untuk mencegah adanya program yang sudah masuk anggaran tetapi tidak bisa dilaksanakan secara optimal," kata Rojik.

Rojik mendorong, agar Pemkab segera mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan yang telah mendapatkan alokasi anggaran. Kegiatan yang berpotensi mengalami keterlambatan perlu dimonitor sejak awal.

Pengawasan juga diminta diperkuat terhadap pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah. Langkah tersebut untuk menjaga potensi penerimaan sekaligus mencegah ketidakefisienan belanja. "Kami meminta seluruh catatan dan rekomendasi DPRD ditindaklanjuti dengan baik oleh pemerintah," tegasnya.

Baginya rekomendasi tersebut merupakan hasil pembahasan banggar bersama TAPD. Catatan DPRD tidak hanya berkaitan dengan besaran anggaran, tetapi juga pelaksanaan program setelah perubahan APBD ditetapkan. Karena itu, monitoring menjadi bagian penting dalam pelaksanaan anggaran 2026.

Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih menjelaskan, persetujuan Perubahan APBD merupakan hasil pembahasan bersama antara DPRD dan pemerintah. Setelah Raperda disetujui, pihaknya tetap akan menjalankan fungsinya sebagai pengawas pelaksanaan anggaran. "Kami ingin memastikan program yang sudah dianggarkan dapat berjalan sesuai rencana," kata Nasih.

Pembahasan anggaran menjadi ruang bagi DPRD untuk memberikan catatan terhadap pendapatan maupun belanja daerah. Rekomendasi banggar menjadi bagian dari hasil pembahasan yang perlu diperhatikan pemerintah dalam pelaksanaan APBD. Terutama terkait pencapaian PAD dan percepatan program yang sudah mendapatkan alokasi. (ful/xav)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

SIDAK JEMBATAN CANDINEGORO SEKITAR RP1,46 MILIAR, WABUP MIMIK WARNING KONTRAKTOR



Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Wabup meminta kontraktor tidak mengabaikan standar spesifikasi teknis maupun target waktu yang telah ditetapkan. Dia mengingatkan adanya konsekuensi terhadap kontraktor apabila pekerjaan tidak segera diperbaiki dan dipercepat sesuai ketentuan.

Wabup Mimik berharap percepatan pengerjaan segera dilakukan dengan tetap memperhatikan kualitas konstruksi. Hal tersebut penting agar jembatan selesai sesuai target dan memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Candinegoro dan sekitarnya.

Anggaran pembangunan Jem-

batan Candinegoro sekitar Rp1,46 miliar. Wabup Mimik meminta kontraktor tidak mengabaikan standar spesifikasi teknis maupun target waktu yang telah ditetapkan. Dia mengingatkan adanya konsekuensi terhadap kontraktor apabila pekerjaan tidak segera diperbaiki dan dipercepat sesuai

ketentuan.

Wabup Mimik berharap percepatan pengerjaan segera dilakukan dengan tetap memperhatikan kualitas konstruksi. Hal tersebut penting agar jembatan selesai sesuai target dan memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Candinegoro dan sekitarnya. **(Khol/Dy)**

POJOK KIRI
KORAN RAKYAT

Normalisasi di Area Sawah Kedungkendo Permukaannya Tidak Rata, Memicu Pendangkalan Dini

Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Normalisasi Avour yang Di kerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (Dinas PUBM dan SDA) yang berlokasi di area Sawah Kedungkendo kecamatan Candi merupakan pekerjaan yang bertujuan untuk melewati debit banjir/luapan banjir secara aman dengan jalan mengecek kapasitas Avour dan melakukan pelurusan alur sungai yang disertai dengan perkuatan tebing dan stabilisasi dasar sungai, sehingga tidak terjadi limpasan/luapan.

Dalam pekerjaan Normalisasi tersebut jelasnya dilakukan dengan cara memperbesar dimensi pada penampang melintang Avour yang besarnya penampang sungai dibuat sedemikian rupa sehingga tidak terjadi limpasan air dan dapat mengalirkan debit air dengan melakukan pengerukan dan peninggian tanggul, Selain itu penampang Avour yang tidak beraturan dibuat bentuk trapesium.

Tapi pada realita di lapangan hasil investigasi jurnalis pojok kiri di lapangan Senin (21/9) normalisasi Avour yang berlokasi di area pesawahan Desa Kedung Kendo kecamatan Candi Tidak sesuai dengan Uraian yang tertulis Diatas Dimana Pada pekerjaan tersebut Pekerjaan yang dilakukan asal jadi yang menyebabkan permukaannya tidak rata, sehingga sangat berisiko memicu masalah baru yaitu pendangkalan dini dan Tanah dari tebing yang tidak rata



serta tidak dipadatkan dengan benar akan mudah rontok terbawa air, sehingga saluran avour kembali dangkal dalam waktu singkat.

Saat jurnalis pojok kiri konfirmasi kepada Herwindo Widi-anto selaku kepala bidang ketahanan Drainase dinas PUBM melalui Handphone 0813 XXXX XXXX karena pekerjaan tersebut tidak disertakan papan informasi kegiatan jurnalis pojok kiri bertanya siapa nama rekanan pekerjaan normalisasi tersebut dia menjawab” saya tanyakan direksi teknisnya”

kemudian jurnalis pojok kiri bertanya siapa direksi teknisnya” dia menjawab” itu Satgas Pak” dan dia juga tidak menjawab siapa ketua satgasnya” Selasa (22/9).

Dari dua pertanyaan tersebut tentunya membuahkan hasil yang ambigu (membingungkan) karena Dalam konteks manajemen proyek (khususnya proyek infrastruktur atau konstruksi pemerintah), Direksi Teknis dan Satgas (Satuan Tugas) memiliki peran, wewenang, dan ruang lingkup yang sangat berbeda. (Nang/ bersambung)

Jelang Musim Hujan, 8 Sungai di Candi-Tanggulangin Dikebut Normalisasi



PETUNJUK: Wabup Sidoarjo Mimik Idayana menyebut sejumlah sungai mengalami pendangkalan.

KOTA-Musim hujan belum tiba, namun Pemkab Sidoarjo sudah mengantisipasi menghadapi ancaman banjir. Sejumlah sungai dan saluran air yang mengalami pendangkalan langsung disasar untuk dinormalisasi. Delapan titik di Kecamatan Candi dan Tanggulangin menjadi sasaran pengerukan menggunakan alat berat.

Upaya tersebut dilakukan Satgas Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA)

Kabupaten Sidoarjo. Senin (21/9), dua alat berat ekskavator dikerahkan untuk mengeruk saluran sekunder Kedunguling di Desa Durungbanjar, Kecamatan Candi. Normalisasi saluran sekunder Kedunguling dilakukan sepanjang sekitar 1,5 kilometer. Pengerukan dilakukan untuk mengembalikan kapasitas saluran dalam menampung dan mengalirkan air, sekaligus mengantisipasi luapan saat curah hujan tinggi.

● Ke Halaman 10



Jelang Musim Hujan,...

Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana mengatakan, normalisasi sungai menjadi salah satu fokus Pemkab Sidoarjo menjelang musim penghujan. Terlebih, sejumlah sungai mengalami pendangkalan dan berada di wilayah yang selama ini rawan terdampak banjir.

"Saya ada di Kecamatan Candi, Desa Durungbanjar. Sungai di desa ini memang terjadi pendangkalan. Hari ini

kita keruk, kita normalisasi," ujarnya. Menurut Mimik, pendangkalan membuat daya tampung sungai berkurang. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan air meluap ketika debit meningkat akibat hujan deras.

Karena itu, dia memastikan pengerjaan normalisasi tidak hanya dilakukan di satu lokasi. Pemantauan akan terus dilakukan untuk memastikan pengerukan berjalan sesuai kebutuhan.

"Menghadapi musim hujan ini saya akan selalu siaga. Mengawasi lang-

sung sungai-sungai di Kabupaten Sidoarjo," tegasnya.

Mimik berharap normalisasi dilakukan secara maksimal sehingga dapat membantu mengurangi potensi banjir di sejumlah wilayah Sidoarjo.

"Saya ingin pengerjaan normalisasi sungai dilakukan dengan baik sebagai upaya menanggulangi banjir," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Sumber Daya Air DPUBMSDA Sidoarjo Suprayitno mengatakan, pengerahan

alat berat dilakukan secara terjadwal. Setelah menyasar saluran sekunder Kedunguling, alat berat akan bergerak ke sejumlah titik lain di Kecamatan Candi dan Tanggulangin.

Di Kecamatan Candi, normalisasi dilakukan di saluran Afvour Kedunguling Desa Kedungpeluk, saluran Afvour Link II Desa Kedungkendo, serta saluran Afvour Link III Desa Klurak.

Sedangkan di Kecamatan Tanggulangin, pengerukan menyasar saluran Gedangrowo Desa Kedungbanteng,

saluran sekunder Gedangrowo Desa Kalidawir, saluran sekunder Gedangrowo Desa Ngaban, dan Afvour Ketapang Desa Ketapang.

"Alat berat lainnya akan terjun ke titik-titik lain di Kecamatan Candi dan Tanggulangin," kata Suprayitno.

Dengan pengerahan alat berat secara bertahap tersebut, Pemkab Sidoarjo menargetkan titik-titik saluran yang mengalami pendangkalan dapat segera ditangani sebelum intensitas hujan meningkat. (dik/vga)



Flyover Gedangan Didesain Atasi Kemacetan hingga 30 Tahun ke Depan

KOTA-Rencana pembangunan Flyover Gedangan Sidoarjo belum menemukan titik final. Pemkab Sidoarjo mendorong desain enam jalur di bagian utama dan dua jalur di sisi lainnya atau skema 6-2, agar kapasitas jalan mampu mengantisipasi lonjakan kendaraan hingga 30 tahun ke depan.

Namun, desain tersebut masih harus diselaraskan dengan kebutuhan lahan dan rencana pengembangan jalur kereta api. Per-

bedaan kebutuhan lahan antara Pemkab Sidoarjo, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BP2JN) Jawa Timur-Bali, PT KAI, serta rencana pembangunan SRRL menjadi pembahasan utama.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo Muhammad Makhmud usai paparan Penyesuaian Detail

● Ke Halaman 10



PROGRES: Paparan Penyesuaian Detail Engineering Design (DED) Fly Over Gedangan di Opsroom Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sidoarjo, Selasa (22/9).

DIKY SANSIR/RADAR SIDOARJO

Flyover Gedangan Didesain...

Engineering Design (DED) Fly Over Gedangan di Opsroom Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sidoarjo, Selasa (22/9).

Makhmud mengatakan, perbedaan kebutuhan lahan tersebut perlu segera diselesaikan karena berkaitan langsung dengan desain akhir flyover.

Terlebih, kawasan tersebut juga akan bersinggungan dengan rencana pembangunan jalur ganda atau double track yang masuk dalam pengembangan SRRL pada 2027.

"Harapan kami pembangunan ini tidak hanya untuk 15 tahun hitungannya, tapi untuk 30 tahun ke depan supaya mengurangi kemacetan," ujarnya.

Menurut Makhmud, terdapat dua opsi desain yang masih dibahas, yakni 6-2 dan 4-2. Skema 6-2 dinilai Pemkab Sidoarjo lebih mampu menampung pertumbuhan volume kendaraan dalam jangka panjang.

Dengan skema 6-2, terdapat enam jalur pada bagian utama, masing-masing tiga jalur, serta dua jalur pada sisi lainnya. Sementara skema 4-2 me-

miliki kapasitas lebih terbatas.

"Kalau 4-2, titik jenuhnya diperkirakan lebih cepat, sekitar 15 tahun. Kalau 6-2, bisa untuk 30 tahun," jelasnya.

Pemkab Sidoarjo, kata Makhmud, cenderung menginginkan skema 6-2. Pertimbangannya bukan sekadar memperbesar kapasitas jalan, tetapi juga menghindari persoalan pembebasan lahan kembali ketika kawasan Gedangan semakin berkembang.

Jika kebutuhan lahan untuk kapasitas 30 tahun sudah disiapkan sejak awal, pemerintah tidak perlu kembali melakukan pembebasan lahan ketika

flyover sudah beroperasi dan kawasan di sekitarnya semakin padat.

"Daripada nanti dalam 4 atau 5 tahun kita harus kembali melakukan pembebasan lahan, lebih baik kebutuhan sampai 30 tahun sudah dihitung dari sekarang," katanya.

Saat ini, peta bidang untuk kebutuhan lahan disebut sudah selesai. Namun, penentuan bidang yang benar-benar terdampak masih menunggu kepastian Right of Way (ROW) berdasarkan DED terbaru.

Persoalannya, terdapat perbedaan koordinat dan kebutuhan lahan di titik

yang berdekatan dengan kawasan stasiun dan jalur kereta api. Karena itu, keberadaan PT KAI menjadi penting dalam menentukan desain akhir.

Dalam paparan tersebut, PT KAI sebenarnya telah diundang. Namun, pihak KAI belum dapat hadir sehingga pembahasan belum menghasilkan kesepakatan final.

"Kami berharap nanti ada solusi terkait penyesuaian kebutuhan lahan, apakah ada penambahan atau pengurangan. Ini yang akan kami koordinasikan lebih lanjut dengan PT KAI," tutur Makhmud. (dik/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



DIKY SANSIRI/RADAR SIDOARJO

RENJA: Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo, Selasa (22/9).

Renja DPRD 2027 Dipasang Target: Banjir, PDAM, Desa hingga Kesehatan Jadi Sorotan

KOTA-DPRD Sidoarjo mulai memetakan pekerjaan rumah yang harus dituntaskan sepanjang 2027. Tak sekadar menyusun agenda rapat, Rencana Kerja (Renja) DPRD tahun depan diarahkan untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap sejumlah persoalan yang masih menjadi sorotan di Sidoarjo.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Sidoarjo Abdi-

llah Nasih se usai Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo, Selasa (22/9). Dalam rapat tersebut, Renja DPRD Sidoarjo Tahun 2027 resmi ditetapkan sebagai Keputusan DPRD.

Abdillah menjelaskan, Renja DPRD merupakan agenda internal yang wajib ditetapkan pada September, sebelum pembahasan dan pengesahan APBD 2027. Selain Renja

DPRD, terdapat dua agenda penting lain yang harus disiapkan, yakni APBD 2027 dan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027.

"Jadi ada tiga hal untuk pengedokan tahun 2027 itu, APBD, Propemperda, dan Renja DPRD. Semuanya diawali dari Renja DPRD dan memang harus September," jelasnya.

● Ke Halaman 10



Renja DPRD 2027..

Menurut politikus senior Fraksi PKB tersebut, Renja 2027 telah dibahas melalui rapat kerja masing-masing komisi. Agenda yang disusun mencakup berbagai kegiatan kedewanan, mulai audiensi, inspeksi terhadap (sidak), hingga pengawasan terhadap program dan kinerja mitra kerja pemerintah daerah.

Namun, Abdillah menekankan agar Renja 2027 tidak berhenti sebagai daftar kegiatan rutin. Persoalan yang

menjadi pekerjaan rumah pada 2026 harus menjadi fokus pengawasan yang lebih tajam pada tahun depan.

Komisi A, misalnya, diminta memperkuat pengawasan terkait penataan desa dan persoalan kepegawaian. Berbagai kekurangan yang ditemukan selama 2026 diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan mitra kerja terkait.

"PR-PR yang ada di tahun 2026 ini lebih dipertajam. Misalkan target Komisi A untuk penataan desa-desa dan

kepegawaian. Kekurangan macam-macam ini kita fokuskan untuk terus melakukan pengawasan dan koordinasi dengan mitranya," ujarnya.

Sementara itu, Komisi B akan mendapat perhatian pada sektor pelayanan air minum. Terlebih, PDAM Sidoarjo kini telah terbentuk. DPRD meminta fungsi pengawasan sekaligus pendampingan terhadap program PDAM diperkuat pada 2027.

Evaluasi terhadap persoalan Umbulan juga menjadi salah satu hal

yang akan menjadi perhatian.

"Komisi B, karena barusan ada PDAM terbentuk, maka tahun 2027 proses pengawasan dan program-program pendampingan kepada PDAM juga harus sama. Termasuk evaluasi terkait Umbulan kemarin," kata Abdillah.

Untuk Komisi C, persoalan banjir dan sejumlah pekerjaan infrastruktur menjadi bagian penting dalam agenda pengawasan. Termasuk berbagai persoalan yang muncul pada pelaksanaan program sebelumnya,

seperti kelebihan bayar.

Sedangkan Komisi D diarahkan untuk memperkuat pengawasan terhadap sektor pelayanan dasar, termasuk persoalan kesehatan dan layanan masyarakat.

"Komisi C bagaimana masalah banjir dan macam-macam itu. Yang hari ini terkait kelebihan bayar dan lainnya. 2027 bagaimana program Komisi C untuk melaksanakan pengawasan. Komisi D juga sama, orang sakit dan macam-macam," jelasnya. (dik/vga)

